



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Februari 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.20 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Laporan hasil investigasi Tim Investigasi atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara; 2. Penyampaian hasil audit teknis terhadap jembatan dengan bentang panjang, terutama jembatan dengan sistem <i>Suspension</i> dan <i>Cable Stayed</i> . 3. Penjelasan tentang data korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Basarnas, Kabareskrim Polri, Kapolda Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur diwakili Kadis PU Provinsi Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara, Direksi PT Utama Karya, Direksi PT Perentjana Djaja, Direksi PT Bukaka Teknik Utama, dan Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Basarnas, Kabareskrim Polri, Kapolda Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur diwakili Kadis PU Provinsi Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara, Direksi PT Utama Karya, Direksi PT Perentjana Djaja, Direksi PT Bukaka Teknik Utama, dan Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik pada hari ini adalah penjelasan dan laporan hasil investigasi Tim Investigasi atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara; penyampaian hasil audit teknis terhadap jembatan dengan bentang panjang, terutama jembatan dengan sistem *Suspension* dan *Cable Stayed* dan penjelasan tentang data korban runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara.

3. Ketua mempersilakan kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Runtuhnya Jembatan Kukar, Kepala Basarnas, Kabareskrim Polri, Kapolda Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur diwakili Kadis PU Provinsi Kaltim, Bupati Kutai Kartanegara, Direksi PT. Utama Karya, Direksi PT. Perentjana Djaja, dan Direksi PT. Bukaka Teknik Utama, untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang berpedoman pada azas yang mengutamakan aspek kebenaran akademik baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Berdasarkan kesimpulan Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang menyatakan kesalahan telah terjadi sejak awal perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan, maka Komisi V DPR RI meminta Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh.
3. Komisi V DPR RI meminta kepada pihak berwenang untuk menemukan dokumen kontrak kerja konsultan perencana dan supervisi, kontraktor, beserta gambar perencanaan dan *as built drawing* serta dokumen lainnya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri.
4. Komisi V DPR RI meminta kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat menyampaikan Laporan Lengkap Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara kepada Komisi V DPR RI.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pembina jasa konstruksi agar menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait pembinaan masyarakat jasa konstruksi dalam kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara.
6. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mendistribusikan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) jembatan bentang panjang yang sudah selesai ke seluruh Pemerintah Daerah.
7. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperpanjang masa kerja Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara selama 30 hari kerja sejak hari ini untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 8 Februari 2012

**WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

ttd

**HERMANTO DARDAK**

**KEPALA BASARNAS**

ttd

**DARYATMO**

**KETUA RAPAT,**

ttd

**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

**KABARESKRIM POLRI,**

ttd

**SUTARMAN**

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit teknis terhadap jembatan dengan bentang panjang untuk menghindari berulangnya kegagalan bangunan jembatan.
1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pembina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) agar menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi terkait pertanggungjawaban profesionalisme badan usaha dan tenaga ahli dalam kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara.

